

TUJUAN
KEPALA DAERAH

SASARAN
KEPALA DAERAH

TUJUAN
ESELON II

SASARAN
ESELON II

SASARAN
ESELON III

SASARAN
ESELON IV

SASARAN
PELAKSANA

Meningkatkan tingkat kondisivitas daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan masyarakat.
IK : Prosentase Penduduk Miskin

Menurunnya kemiskinan di Perdesaan dan Perkotaan
IK : Persentase Penduduk Miskin Perdesaan

Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
IK : Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi

Meningkatnya pengelolaan organisasi perangkat daerah.
IK : Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Dinas PMD Prov. Kalteng.

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
IK : Nilai SAKIP Dinas PMD.

Meningkatkan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
IK : Persentase Keterlaksanaan.

Meningkatnya kemandirian desa.
IK : Status Desa Mandiri berdasarkan IDM

Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan
IK : Jumlah desa mandiri, desa berkembang, desa tertinggal, aparaturnya terlihat

Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.
IK : Posyandu, Posyantek, PKK, BUMDes.

Peningkatan administrasi pemerintahan desa.
IK : Jumlah Aparatur terlihat

Peningkatan kerjasama desa.
IK : Jumlah desa yg bekerjasama (MoU, Perjanjian kerjasama, laporan)

Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.
IK : Jumlah lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat yang aktif.

Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
IK : Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran.

administrasi keuangan perangkat daerah.
IK : Jumlah dokumen administrasi keuangan.

administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah.
IK : Jumlah dokumen BMD.

administrasi kepegawaian perangkat daerah.
IK : Jumlah orang yang mengikuti kegiatan.

administrasi umum perangkat daerah.
IK : Jumlah penyediaan barang/jasa.

pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
IK : Jumlah barang milik daerah.

penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.
IK : Jumlah jasa penunjang yang tersedia.

pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
IK : Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan pemeliharaan.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.
IK : Persentase pemerintah desa yang telah memperoleh pembinaan.

Facilitasi kerja sama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi.
IK : Jumlah desa yang terfasilitasi kerjasamanya.

Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas daerah kabupaten/kota.
IK : Jumlah lembaga yang dibina.

Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD.
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD.

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

Pengadaan Paketan Dinas beserta atribut kelengkapannya.
Pengadaan Paketan Dinas beserta atribut kelengkapannya.

Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.
Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.

Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Facilitasi Kunjungan Tamu.
Facilitasi Kunjungan Tamu.

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan.
Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan.

Pengadaan Mebel.
Pengadaan Mebel.

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan Lainnya.
Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan Lainnya.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pakaj dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pakaj dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan.

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.

Facilitasi penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota yang mengatur desa.
Facilitasi penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota yang mengatur desa.

pembinaan manajemen pemerintahan desa.
pembinaan manajemen pemerintahan desa.

facilitasi pengelolaan keuangan desa.
facilitasi pengelolaan keuangan desa.

facilitasi pengelolaan aset desa.
facilitasi pengelolaan aset desa.

facilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
facilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

facilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan.
facilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan.

facilitasi pelaksanaan profil desa dan kelurahan.
facilitasi pelaksanaan profil desa dan kelurahan.

pembinaan aparaturnya pemerintah desa.
pembinaan aparaturnya pemerintah desa.

pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD.
pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD.

pembinaan dan pengawasan penetapan peraturan BUM Desa kabupaten/kota dan lembaga kerja sama antar desa.
pembinaan dan pengawasan penetapan peraturan BUM Desa kabupaten/kota dan lembaga kerja sama antar desa.

facilitasi penetapan dan pengesahan batas desa.
facilitasi penetapan dan pengesahan batas desa.

facilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat.
facilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat.

peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat.
peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat.

facilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa.
facilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa.

facilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna.
facilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna.

facilitasi penyelenggaraan ketertarikan, keterlibatan dan perlindungan masyarakat desa.
facilitasi penyelenggaraan ketertarikan, keterlibatan dan perlindungan masyarakat desa.

facilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.
facilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah,

H. ARYAWAN, S.IP., M.IP
NIP. 19700514200604101

